

**ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI  
PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Dibuat Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Oleh:**

**NUR IJEH**

**NIM:1402026136**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50183

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. NUR IEH

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : NUR IEH

NIM : 1402026136

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik

Judul : Analisis Pendapat Asy-Syirazy Tentang Mematuhi Perintah

Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.

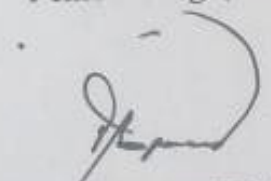
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

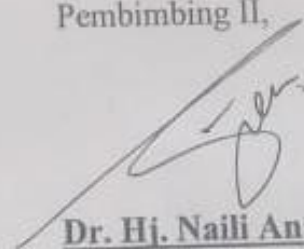
Semarang, 04 Maret 2020

Pembimbing II,

Pembimbing I,

  
Dr. Tholkhatul Khoir., M.Ag

NIP. 197701202005011005

  
Dr. Hj. Naili Anafah., S.H.I, M.Ag.

NIP. 198106222006042022



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Ijeh  
NIM : 1402026136  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. (Penguji 1)
2. Amir Tajrid, M.Ag. (Penguji 2)
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3.46 ( B ).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
ALI IMRON

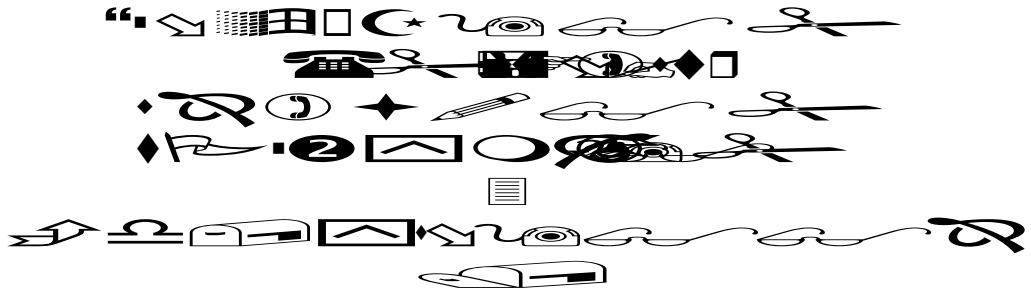


Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

  
RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO



*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS. Al-Isra’ [17] :33)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, Januari 2020**



## ABSTRAK

Imam asy-Syiraziyy dalam karangannya kitab *al-Muhazzab* mengemukakan bahwa “Jika seorang penguasa menyuruh seseorang laki-laki untuk membunuh tanpa *haqq*, maka apabila seseorang yang diperintah tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka hukuman *kafarat*, *qishas*, *diyat* wajib ditanggung oleh penguasa. Karena orang yang diperintah dimaafkan dalam pembunuhannya. Dan karena seorang penguasa tidak boleh memerintah kecuali dengan *haqq* (benar). Dan apabila seorang yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka yang wajib menanggung hukuman *kafarat*, *qishas* atau *diyat* adalah seorang yang disuruh. Karena tidak boleh mematuhi sesuatu yang tidak halal”. Dari pendapat tersebut nampak permasalahan yang dapat penulis simpulkan, yaitu dalam peristiwa pidana yang diungkapkan oleh Imam asy-Syiraziyy penyebab adanya pembunuhan adalah penguasa, yaitu si penyuruh, tanpa adanya orang yang menyuruh (penguasa) pasti tidak akan ada peristiwa pembunuhan, artinya pertanggungjawaban pidana haruslah pada si penyuruh. Namun dalam pendapat tersebut, si penyuruh dalam kondisi tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, ia yang dihukum.

Dari latar belakang masalah tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat asy-Syiraziyy tentang mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan? 2) Bagaimana *istinbath* Hukum asy-Syiraziyy tentang mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *al-Muhazzab* karya Imam asy-Syiraziyy. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung, dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh yang terkait. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu study dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Imam asy-Syiraziyy berpendapat yaitu jika seorang pemimpin menyuruh seseorang untuk melakukan pembunuhan, ketika yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka hukuman dibebankan kepada yang disuruh, dan apabila yang disuruh tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka yang wajib dihukum adalah yang menyuruh. keduanya sama-sama punya keterlibatan untuk melakukan pembunuhan. Keduanya (yang menyuruh dan yang disuruh) sama-sama terbebani pertanggungjawaban pidana atas kematian si terbunuh, akan tetapi kadar hukumannya berbeda. 2) Bahwa *Istinbath* hukum yang digunakan Imam asy-Syiraziyy adalah hadits yaitu : “*Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.*”. Secara tekstual, hadits tersebut tidak mengarah secara spesifik tentang perintah atasan untuk melakukan pembunuhan. Karena pembunuhan yang diperintahkan adalah pembunuhan tanpa *haqq*, maka perbuatan penguasa merupakan perbuatan maksiyat. Artinya “perbuatan maksiyat” itulah yang menjadi *illat* atau sebab tidak boleh diikutinya perintah-perintah darinya

**Kata Kunci:** *asy-Syiraziyy, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul: **ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Dr. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, Januari 2020

Penulis

**NUR IJEH**  
**NIM:1402026136**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سرل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

## 3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
اي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
او	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كولو

## 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

## 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN DEKLARASI.....	VI
HALAMAN ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian dan Unsur <i>Jarimah</i> .....	16
B. Macam-macam <i>jarimah</i> .....	18
C. Menyuruhlakukan Tindak Pidana.....	22
D. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan.....	25
<b>BAB III PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN</b>	
A. Biografi Imam asy-Syiraziyy.....	35
B. Pendapat asy-Syiraziyy tentang Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	50

C. <i>Istinbath</i> asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
--	----

#### **BAB IV ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

A. Analisis Pendapat asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	69
B. Analisis <i>Istinbath</i> asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	77

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	82
C. Penutup.....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang menguraikan hukum pidana Islam yang mengatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, dimana *fiqh jinayah* membahas asas-asas dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (*jarimah*) atau macam-macam *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Salah satu pembahasan dalam hukum pidana Islam yaitu pembunuhan (*al-Qatl*). Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan yaitu suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>2</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam mengemukakan bahwa Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 1

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), jilid-2, Hlm. 6

seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diklarifikasikan maka pembunuhan dapat dikategorikan menjadi: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata'*), dan semi disengaja (*syibhu al-amd*).<sup>3</sup>

Terkait Pembunuhan dengan sengaja, mengutip dari buku Hukum Pidana Islam karya Rokhmadi, yaitu pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah: korban yang dibunuh adalah manusia masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (Negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian kemanan, serta kematian korban akibat dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki atas kematiannya.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja adalah adanya hukuman *qishas*. Namun, pelaksanaan hukuman *qishas* diserahkan pada keputusan keluarga korban (terbunuh), apakah tetap dilaksanakan *qishas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar dengan penggantian yang ditetapkan keluarga si terbunuh.

Lalu bagaimana jika pembunuhan dilakukan melalui perantara, yaitu menyuruh orang lain untuk membunuh? Hal ini menjadi problem terkait

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), Hlm. 24.

<sup>4</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm. 127.

pertanggungjawaban pidana antara orang yang menyuruh dengan yang disuruh.

Menurut Imam asy-Syirazy dalam karangannya kitab *al-Muhazzab* mengatakan :

وان امر الإمام بقتل رجل بغري حق, وان كان امراً لم يلزم ان يقتله بغري حق, وجب  
ضمن القتل من الكفارة والقصاص والدية علي الإمام, ألن الامور م عذور ب قتله, ألن الظاهر  
ان الإمام ال أيمر ال ا بطق. وان كان يلزم أنه يقتل بغري حق, وجب ضمان  
القتل من الكفارة والقصاص او الدية علي الامور, ألنه ال جيز طاعته فيما ال حيل.

*“Jika seorang penguasa menyuruh seseorang laki-laki untuk membunuh tanpa haqq, maka apabila seseorang yang diperintah tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa haqq, maka hukuman kafarat, qishas, diyat wajib ditanggung oleh penguasa. Karena orang yang diperintah dimaafkan dalam pembunuhannya. Dan karena seorang penguasa tidak boleh memerintah kecuali dengan haqq (benar). Dan apabila seorang yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa haqq, maka yang wajib menanggung hukuman kafarat, qishas atau diyat adalah seorang yang disuruh. Karena tidak boleh mematuhi sesuatu yang tidak halal”<sup>5</sup>*

Adapun Imam al-Imrani dan Imam Nawawi al-Bantani yang juga bermadzhab Syafi’iyyah juga sependapat dengan asy-Syirazyi terkait dengan hukuman mematuhi perintah Imam untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.<sup>6</sup> Dalam kondisi tertentu, pembunuhan tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat dan aturan. Ada dua kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, yaitu membunuh ketika peperangan dan membunuh ketika menghukum. Nabi SAW. telah menjelaskan maksud pembunuhan yang *haqq* dalam hadits :

---

<sup>5</sup> Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi’iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 27-28.

<sup>6</sup> Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim al-Imrani al-Syafi’i al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Dar al-Minhaj Jilid 11, Hlm. 349.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ يَسْأَلُ عَنْ ثَلَاثٍ أَلَا تَعْلَمُ  
 يَسْأَلُ عَنْ ثَلَاثٍ أَلَا تَعْلَمُ يَسْأَلُ عَنْ ثَلَاثٍ أَلَا تَعْلَمُ  
 وَالثَّلَاثُ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ  
 وَالثَّلَاثُ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ

Artinya: Dari Abdullâh (bin Mas'ud), ia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi Lâ Ilâha illa Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, kecuali dengan satu dari tiga (perkara): (1) satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain, (2) orang yang sudah menikah yang berzina, (3) orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jama'ah (Muslimin)”. [HR Bukhari, no. 6484; dan Muslim, no. 1676].

Dasar hukum yang digunakan Imam asy-Syiraziyy dalam berpendapat tersebut adalah hadits. Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut :

لَا طَاعَةَ لِمَا خِلَافُ رِوَايَةٍ  
 لِمَا خِلَافُ رِوَايَةٍ

Artinya: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.”<sup>7</sup>

Adapun perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan ada tiga macam yaitu:

1. Perbuatan langsung, *fukahha'* mendefinisikan bahwa pembunuhan langsung adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebab tanpa perantara yang lain. Misalnya menyembelih dengan pisau, menyembelih merupakan hal yang membawa kematian dan sebagai faktor yang mematikan.

2. Sebab, *fuqaha'* mendefinisikan bahwa sebab adalah setiap perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya ia sebagai *ilat*

---

<sup>7</sup> Sebagaimana dalam Abi Ishaq asy-Syirazy, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 28.

(*causa*/penyebab kematian tetapi bukan menjadi penyebab langsung, melainkan sebagai perantara. Sebab ada tiga macam yaitu:

- 1) Sebab secara inderawi (*hissi*), seperti membuat orang yang dipaksa atau yang diperintah melakukan pembunuhan.
  - 2) Sebab Syara'i seperti kesaksian palsu atas pembunuhan, kesaksian ini menyebabkan hakim memutuskan hukuman mati.
  - 3) Sebab '*urf*' (adat kebiasaan), menyebabkan kematian langsung seperti menggali lubang ditengah jalan dan menutupnya sehingga menimbulkan korban, sesungguhnya galian lubang adalah penyebab kematian tetapi bukan lubang tersebut yang mematikan korban, yang membuatnya mati adalah terperosoknya korban kedalam lubang tersebut.
3. Syarat, syarat adalah setiap perbuatan yang tidak mempengaruhi (menimbulkan) kematian dan tidak menyebabkannya, namun kematian terjadi karena sebab lain yang mempengaruhi kematian. Misalnya ada orang yang melemparkan orang lain ke dalam sumur yang digali oleh orang ketiga tanpa maksud ingin membunuh, orang yang dilempar menjadi mati, yang menjadi pemyebab kematian sesungguhnya adalah lemparan tersebut bukan galian tersebut. Akan tetapi lemparan tadi tidak mungkin memiliki dampak kematian jika tidak ada sumur.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina'I al-Islami* (Muassasah Ar-Risalah, tt), 203-204.

Dari penjelasan diatas, nampak problem yang dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pendapatnya Imam asy-Syirazy, orang yang disuruh untuk melakukan pembunuhan akan dikenai hukuman apabila ia mengetahui bahwa pembunuhan itu tanpa *haqq*, terlebih yang menyuruh adalah seorang penguasa. Menurut teori *sebab* yang telah dijelaskan diatas, seorang yang menyuruh (penguasa) merupakan sebab, yang juga dapat dikatakan sebagai *illat*. Padahal, apabila sebab/*illat* itu tidak ada, maka tidak akan terjadi peristiwa pembunuhan. Akan tetapi dalam pendapatnya Imam asy-Syirazy ia di kenai hukuman apabila mengetahui bahwa pembunuhan yang dilakukan adalah tanpa *haqq*.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, kiranya perlu dikaji lebih dalam mengenai pendapat Imam asy-Shirazy tentang menyuruhlakukan tindak pidana pembunuhan melalui skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapat Asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dan langkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui Pendapat Asy-Syiraziyy tentang Hukuman Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui Metode *Istinbath* Hukum Asy-Syiraziyy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

#### 2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

#### 3. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu bahan studi banding bagi peneliti lainya tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan telah cukup banyak dibahas oleh penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

*Pertama*, Skripsi karya Kiswandhi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 55 Kuhp Tentang menyuruhlakukan Tindak Pidana” skripsi tersebut berfokus pada bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang menyuruh lakukan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 55 KUHP, dan sanksi menyuruhlakukan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam. Hasil penelitian menunjukkan pertama,bahwa setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya.Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung, seperti pelaku langsung itu hanya sekadar alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, ia dijatuhi hukuman hudud atau qishas karena ia dikategorikan sebagai pelaku langsung, bukan sebagai pelaku tidak langsung.

hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanya maupun perbuatannya, Sedangkan menurut KUHP pasal 55 pelakuyang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi karya Ayu Lestari yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap sanksi Pelaku yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Program Studi Jinayah Siyasah fakultas Syari’ah dan Hukum universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatahpalembang, 2016. Skripsi tersebut berfokus pada bagaimana sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum positif. Dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku menyuruh melakukan tindak pidana pencurian? Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut KUHP adalah dipidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan pasal 362 KUHP. Dan sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut fiqh jinayah yaitu sanksi berupa ta’zir.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Jannatun Naimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan

---

<sup>9</sup> Kiswandhi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 55 Kuhp Tentang menyuruhlakukan Tindak Pidana, Iain Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, 2012.

<sup>10</sup> Ayu Lestari, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Program Studi Jinayah Siyasah fakultas Syari’ah dan Hukum universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatahpalembang, 2016

Pengadilan Tinggi Semarang No.11/Pid.Sus/2013/Pt.Tpk.Smg.)”. skripsi tersebut berfokus pada bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg?. Hasil penelitian menunjukkan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab, dipersalahkan karena tanggung jawabnya. Bukan karena perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mestinya apa yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dipersalahkan melanggar Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimana unsur membiarkan uang diambil atau digelapkan telah terjadi padanya. Di sisi lain putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Terdakwa dihukum sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut merupakan *jarimah*. Maka lebih tepatnya, Terdakwa dikenai *jarimah ta'zir*. Hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta juga bisa dibenarkan.<sup>11</sup>

Dari pemaparan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, nampak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian yang telah

---

<sup>11</sup> Jannatun Naimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.11/Pid.Sus/2013/Pt.Tpk.Smg.), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, 2018



dipaparkan diatas berfokus pada menyuruhlakukan tindak pidana dalam KUHP, menyuruhlakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan negeri. Dari hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus kepada pendapat asy-Syiraziyy tentang Hukuman Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Letak perbedaan tersebut dapat dilihat dari tindak pidana dan sumbernya yang dikemukakan oleh asy-Syiraziyy dalam kitab *al-Muhazzab*.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

---

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

ada.<sup>13</sup> Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.<sup>14</sup> Khususnya terkait dengan Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

## 2. Sumber dan bahan hukum

### a. Bahan hukum primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat asy-Syirazy mengenai Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, maka untuk melakukan studi pendapat Imam Malaik, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh penulis adalah kitab *al-Muhazzab* karangan Imam asy-Siyraziy, dan hasil dari data ini hanya sampai pada dataran data deskriptif (berupa penggambaran).

### b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>15</sup> Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 62.

<sup>14</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.

<sup>15</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.<sup>16</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>17</sup> Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang terkait dengan Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

### 4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.<sup>18</sup> Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Imam asy-Siyraziy yang terdapat pada kitab *al-Muhazzab* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

<sup>17</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 211.

<sup>18</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 156.

selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Imam asy-Syirazy.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematisnya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Hukum Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Bab ini didalamnya mengurai tentang teori pembunuhan dan teori pertanggungjawaban pidana.

Bab III : Pendapat Asy-Syirazy tentang Hukum Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Didalamnya mengurai tentang biografi Imam Asy-Syirazy dan pendapatnya tentang hukuman Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab IV : Analisis Pendapat Asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Didalamnya menganalisis

tentang pendapat dan *Istinbath* hukum Imam Asy-Syirazy tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian dan Unsur *Jarimah*

##### 1. Pengertian *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata “*jinayah*” yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata “*jarimah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili mengatakan:

الْجُنَايَةُ أَوْ الْجَرِيمَةُ لَفْظٌ هِيَ الذَّنْبُ أَوْ الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا جَبَّيْنِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ كَيْسَبِهِ

Artinya: “*Jinayah atau jarimah secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.*”

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana

dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تُعَرَّفُ الْجَرَائِمُ بِالشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ أَبْهَنَ أَحْظُورَاتٍ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ إِلَيْهَا عَزَاهُ حَبْدٌ أَوْ  
تُعْزِرُ، وَأَحْظُورَاتٍ هِيَ إِمَّا إِبْتِإَانُ فِعْلٍ مِنْ هِي عَنْهُ أَوْ تَرْكُ مَأْمُورِهِ

Artinya: “*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

Jadi, baik *jarimah* maupun *jinayah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *had*, *qishas* ataupun *ta'zir*.

## 2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:<sup>21</sup>

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau Unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

---

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

- 3) *Al-rukn al-adabi* atau Unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.<sup>22</sup>

## **B. Macam-Macam *Jarimah***

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

### **1) *Jarimah Hudud***

*Jarimah Hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>23</sup> Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

<sup>23</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.



perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.<sup>24</sup>

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, *murtad* atau *riddah*, pemberontakan atau *Al-baghy*, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau *hirabah*, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamar*.<sup>25</sup>

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.<sup>26</sup>

## 2) *Jarimah Qishas Dan Diyat*

*Jarimah qishas-diyat* ialah *jarimah* yang diiancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qishas-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

<sup>25</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).<sup>27</sup>

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).<sup>28</sup>

Baik *qishas* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.<sup>29</sup>

### 3) *Jarimah Ta'zir*

#### a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak

---

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 11.

batasan hukumnya maka masuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu semua *jarimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>30</sup> Menurut al-Mawardi *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.<sup>31</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

*Jarimah ta'zir* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari

---

<sup>30</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

<sup>31</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).<sup>32</sup>

## C. Menyuruhlakukan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Turut Serta

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana ataupun perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits.<sup>33</sup> Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

<sup>33</sup> edeRosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992, h. 86.

pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.<sup>34</sup>

Dengan demikian, perbuatan *jarimah* atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok. Seperti halnya turut serta melakukan *jarimah* adalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan maupun keluasan.<sup>35</sup> Sehingga Turut serta berbuat *jarimah* dalam hukum Islam berada dalam empat kemungkinan, yakni:

- a. Pelaku melakukan *jarimah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- c. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.
- d. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.<sup>36</sup>

Sehingga pengertian turut serta melakukan *jarimah* dalam hukum Islam adalah melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinarr Grafika, 2009), h. 7

<sup>35</sup> Mustofa Hasan, Hukum..., h. 217

<sup>36</sup> Mustofa Hasan, Hukum..., h. 225

bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan turut serta meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan *jarimah*.<sup>37</sup>

Pengertian turut serta berbuat adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil dari pada peristiwa *jarimah*. Pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan perbuatan *jarimah* ialah sama-sama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki. Dimana suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.<sup>38</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan Melakukan Perbuatan Pidana (*Jarimah*) menurut Hukum Islam

Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan fiqh *jinayat* yang merupakan hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Suatu kejahatan atau perbuatan *jarimah* kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.

---

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.

<sup>38</sup> Hamzah Hasan, Hukum..., h. 226

#### **D. Pertanggungjawaban Jarimah Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).<sup>39</sup> Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Pembebanan pidana sendiri dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang oleh syara', baik dilarang melakukan atau meninggalkannya. Perlu diingat bahwa pembebanan pidana juga dikarenakan perbuatan itu dikerjakan sendiri berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa.

##### **2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

<sup>40</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'I al-Islamiy*, jilid II, hlm.57.

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang (perbuatan haram untuk dilakukan).
- b. Pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa) yakni perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauannya sendiri.
- c. Pelaku memiliki pengetahuan (mengetahui akibat hukum dari perbuatan tersebut).<sup>41</sup>

Selanjutnya, apabila ketiga hal tersebut telah terpenuhi, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*jarimah*), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum dewasa (*baligh*) atau orang yang dipaksakan untuk melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana). Kita ketahui bersama bahwa pada anakanak, orang gila atau orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa, maka pada dirinya tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban seperti yang dimaksud diatas.

### 3. Tingkatan/ Motif Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam juga diakui keberadaannya karena sebab beberapa hal, dengan pengertian lain bahwa

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 67.



pertanggungjawaban dapat dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut meliputi perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang (kejahatan). Perbuatan melawan hukum sendiri dalam hukum Islam terdapat tingkatan (klasifikasi), hal tersebut bermula dari bagaimana perbuatan dilakukan dan dengan konsekwensi adanya pertanggungjawaban juga berbeda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat dikategorikan dalam 3 hal perbuatan, yakni:

a. Sengaja (*al- 'amdu*)

Pembahasan mengenai perbuatan yang sengaja, dalam hukum pidana Islam lebih banyak berkaitan dengan jarimah pembunuhan, akan tetapi pada kejahatan lain, tingkatan yang demikian juga sebenarnya dapat diberlakukan. Misalnya dalam hal pencurian, minum *khamr*, dan lain sebagainya. Karena kesengajaan (*dolus*) sendiri dalam hukum pidana masuk sebagai unsur subjektif atau unsur yang melekat pada diri pelaku kejahatan. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan menghendaki akibat dari perbuatannya yakni kematian dari orang yang dibunuh (korban). Tentu saja pertanggungjawaban pada perbuatan karena sengaja lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang berada ditingkat bawahnya.<sup>42</sup>

b. Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdu*)

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 405.

Pengertian perbuatan pidana menyerupai sengaja (*syibhul,, amdu*) adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdu* adalah dikaitkan dengan alat yang digunakan oleh pelaku. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa untuk membunuh, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyerupai sengaja.

c. Tidak sengaja (*syibhul khata'*)

Perbuatan pidana karena tidak sengaja termasuk kategori perbuatan karena kekeliruan, yakni terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena pelaku kurang hati-hati.

4. Hal-hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban, ada hal-hal lain yang mempengaruhi pertanggungjawaban sendiri, dalam hal mempengaruhi yang dimaksud adalah adanya hal lain yang dapat meringankan atau memperberat pertanggungjawaban pada seseorang, antara lain:

- a. Pengaruh tidak tahu terhadap pertanggungjawaban pidana Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Pengertian

mengetahui tentang keharaman suatu perbuatan cukup dengan kemungkinan mengetahui. Apabila seseorang telah mencapai usia dewasa, berakal serta mudah bginya untuk mengetahui apa-apa yang diharamkan natas dirinya baik dengan cara merujuk kepada nash yang menunjukkan keharaman maupun dengan bertanya kepada orang lain. Dengan kesimpulan bahwa dijatuhinya hukuman dan seseorang dapat dianggap memenuhi pertanggungjawaban apabila ia telah *baligh*.<sup>43</sup>

- b. Pengaruh tersalah terhadap pertanggungjawaban pidana Tersalah adalah terjadinya suatu hal bukan atas kehendak pelaku. Pelaku tindak pidana tersalah tidak melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak menghendaknya. Perbuatan itu terjadi bukan karena kehendak dari hatinya dan berlainan dengan yang dimaksud. Pelaku yang tersalah sama seperti pelaku yang sengaja dalam hal pertanggungjawaban pidana setiap kali terjadi perbuatan yang diharamkan oleh syara'. Akan tetapi, sebab pertanggungjawaban pada keduanya tidaklah sama. Pertanggungjawaban pelaku sengaja dalah karena pelaku melanggar perintah syara' dan melkaukan apa yang dilarang oleh syara' (melakuakn hal yang diharamkan), sedangkan sebab pelaku karena tersalah adalah karena melanggar perintah syara'' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan ketidakhatihatian.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 102-103.

c. Pengaruh lupa terhadap pertanggungjawaban pidana Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu yang diperlukan. Dalam syariat Islam, lupa disejajarkan dengan keliru, yakni sama-sama tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum lupa. Sebagian berpendapat bahwa lupa merupakan uzur yang umum dalam ibadah dan 'uqubah (hukuman-hukuman tindak pidana). Akan tetapi, pada pendapat pertama ini meskipun lupa tidak dapat dijatuhinya hukuman maka ia tidak terbebas dari hukuman karena harta dan jiwa yang terpelihara dan mendapat jaminan dari Allah. Kedua, sebagian fuqaha berpendapat bahwa lupa adalah uzur hukuman di akhirat. Untuk hukuman di dunia, lupa tidak dianggap sebagai uzur yang melepaskan dari hukuman dunia kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt. Dalam hal ini, lupa dianggap sebagai suatu uzur dengan syarat terdapat alasan dan motif yang wajar untuk melakukan perbuatan itu, dan tidak ada orang yang mengingatkan orang yang lupa tersebut.<sup>45</sup>

##### 5. Hal-hal yang Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pertanggungjawaban pidana setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu: pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, pelaku mengerjakan perbuatan itu dengan keinginan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat hukum atas perbuatannya. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 108-109.

pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap diri seseorang. Namun, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan. Berikut adalah hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana:

a. Paksaan (daya paksa)

Paksaan dalam fiqih disebut *al-ikrah* yang berarti menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya atau secara paksa. Para fuqaha memberikan beberapa pengertian tentang paksaan (*ikrah*), sebagai berikut:

- Paksaan adalah perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena (pengaruh) orang lain. Karena itu hilangnya kerelaan dan merusak (tidak sempurna) pilihannya.
- Paksaan adalah satu perbuatan yang timbul dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya.
- Paksaan adalah mengancam seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk melakukan suatu perbuatan yang menghilangkan kerelaanya (oleh yang paksa).<sup>46</sup>

Dapat disimpulkan bahwa paksaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menekan orang lain, melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pemaksa sehingga orang yang dipaksa tidak ada

---

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina' al-Islamiy*, jilid II, hlm 221.

pilihan dan hilangnya kerelaan dari orang yang dipaksa untuk menolak melakukan perbuatan yang diinginkan pemaksa. Adapun macam-macam daya paksa adalah:

- 1) *Ikrah mulji* adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan/*ikhtiyar* (orang yang dipaksa). Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa. Nama lain paksaan ini adalah paksaan absolut/*ikrah tamm/absolute overmacht*.
- 2) *Ikrah gair mulji* adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan (orang yang dipaksa), dalam paksaan ini tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak (pukulan-pukulan ringan). Nama lain dari paksaan ini adalah paksaan relatif atau paksaan tidak berat/*ikrah naqis/relative overmacht*. Paksaan relatif hanya berpengaruh pada *tasarruf* (tindakan hukum) yang mensyaratkan adanya kerelaan seperti jual beli, sewa menyewa atau pengakuan. Berdasarkan hal ini paksaan relatif tidak berpengaruh pada kasus tindak pidana.<sup>47</sup> Adapun paksaan *ikrah mulji* (paksaan absolut), memiliki pengaruh terhadap tindakantindakan yang menuntut adanya kerelaan dan pilihan secara sekaligus, seperti memperbuat tindak pidana.

---

<sup>47</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina'I al-Islamiy*, jilid II, hlm 222.

Umpamanya, siapa yang dipaksa melakukan zina maka paksaan yang terjadi pada orang yang dipaksa harus menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan. Artinya paksaan tersebut menjadikan orang yang dipaksa sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pilihan lain untuk menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka paksaan sangat mempengaruhi penghapusan atau berat ringannya hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Adapun syarat-syarat paksaan adalah:

- 1) Ancaman bersifat mulji
- 2) Ancaman harus perbuatan yang dilarang
- 3) Ancaman harus seketika
- 4) Orang yang memaksa mempunyai kemampuan melakukan paksaan
- 5) Orang yang diancam meyakini bahwa orang yang mengancam benar-benar melaksanakan ancamannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 223-225.

### **BAB III**

#### **PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

##### **A. Biografi Imam Asy-Syirazi**

###### **1. Kelahiran**

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi asy-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh asy-Syafi'i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz.<sup>49</sup>

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb Baghdad.<sup>50</sup>

###### **2. Pendidikan**

Pendidikan Imam asy-Syirazi terdapat sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuza'i. Tahun 415 H pindah ke

---

<sup>49</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-1, hlm. 159.

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 39



Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari Abu Bakar al-Barqani, Abi Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>51</sup>

Tahun 415 H dia memasuki Baghdad. Di sinilah bermula keilmuannya, yaitu periode pementasan ilmu. Dia berguru pada Abu Al-Thayyib al-Thabari yang merupakan pendiri imam Syafi'i pada zamannya, menjadi anak murid pada gurunya selama puluhan tahun dan menimba banyak ilmu dari gurunya sehingga ada waktunya beliau menggantikan gurunya (Al-Thabari) dalam majelis ilmu gurunya dan diberi izin atau rekomendasi untuk mengajarkan teman-temannya, dia memiliki jadwal khusus mengajar kemudian ditawarkan untuk mengajar di masjid gurunya dengan memenuhi permintaan tersebut, dia mulai mengajar disana pada tahun 439 H.<sup>52</sup>

Beliau menghabiskan 37 tahun dari umurnya, hingga sampai pada puncak keilmuannya dalam bidang fiqh, ushul fiqh, fiqh muqaran (khilafiyah), diskusi dan perdebatan sehingga menjadi seorang imam besar kalangan mazhab Syafi'i pada abad ke-5 H tanpa ada tandingan. Dia menjadi sumber fatwa dimana pun. Banyak dari penuntut ilmu berguru kepadanya dari segala penjuru dunia hingga muridnya bertebaran di semua penjuru dunia.

---

<sup>51</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin...*, hlm. 159

<sup>52</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali asy-Syirazy, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.) hlm.

Beliau bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu dan tidak memiliki waktu lapang, jika ada waktu lapang akan digunakan untuk menuntut ilmu ataupun mengajar. Karena kesibukannya menuntut ilmu membuatnya terkadang lupa akan makan dan minum. Diriwayatkan bahwasannya, suatu ketika dia sangat menginginkan sebuah makanan lezat. Namun, dia berkata “Tidak layak bagiku untuk memakan makanan ini karena kesibukanku belajar”. Apabila timbul masalah ilmiah, dia tidak akan meninggalkan masalah tersebut sehingga menyelesaikannya. Jika ada orang yang meminta fatwa, dia akan meladeni sampai tuntas sekalipun tidak berada dirumahnya.<sup>53</sup>

### **3. Pengakuan Imam asy-Syirazi**

Abu Ishaq asy-Syirazi adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syafi’iyyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyyah. Az-Zarkali dalam kitab *al-A’lam* yang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fiqih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.33.

bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.<sup>54</sup>

Nama Abu Ishaq asy-Syiraziyy populer dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafiiyyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuk.<sup>55</sup>

#### **4. Guru dan murid Imam asy-Syiraziyy**

Abi Ishaq asy-Syiraziyy telah berguru dengan banyak ulama. Beliau banyak mempelajari ilmu dari guru-guru yang tinggi ilmunya yang memberi kesan mendalam terhadapnya, mereka adalah Abu Hatim Al-Tabari (Wafat 414 H), Abu ‘Abdillah Al-Baidawi (Wafat 424 H), Abu Bakar Al-Barqani (Wafat 425 H), Abu Ahmad bin Ramin (Wafat 430 H), Abu Al-Qasim Al-Karkhi (Wafat 447 H), Abu Ali bin Syazani (Wafat 425 H) dan Abu Al-Thayyib Al-Tabari (Wafat 450 H). Sementara murid-muridnya adalah Abu Hakim Al-Khabari (Wafat 476 H), Abu Al-‘Abbas Al-Jarjani (Wafat 482 H), Abu Mansur Al-Syirazi (Wafat 493 H), Abu Muhammad Al-Taraqi (Wafat 493 H), Abu ‘Ali Al-Fariqi (Wafat 528 H), Fakhrul Islam Al-Syasyi (Wafat 507 H) dan Abu Al-Qasim Al-Kharqi (Wafat 495 H).

Sementara murid-muridnya antara lain adalah :

---

<sup>54</sup> Musthafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula Ilmu Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul 'Sejarah Ushul Fikih', Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, hlm. 275

<sup>55</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, hlm. 128

- a. Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi
- b. Abu Bakar bin al-Hadinah
- c. Abu al-Hasan bin Abd al-Salam
- d. Abu al-Qasim al-Samarqani

Abi Ishaq asy-Syiraziyy adalah seorang yang sangat bersahaja bahkan sangat fakir sampai untuk melaksanakan hajipun ia tidak mampu. Nama Abi Ishaq asy-Syiraziyy sangat populer dimana-mana sebagai cendikiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi'i. Ia pernah menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad. Sebuah perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (menteri) kerajaan Saljuq.<sup>56</sup>

## 5. Karya-Karya Imam asy-Syiraziyy

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi'iyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* dan *at-Tanbih fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syafi'iyah.

Kitab *at-Tanbih fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan

---

<sup>56</sup> Sirajuddin Abbaas, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), hlm. 128.

komentar terhadap kitab tersebut. *Syarah* kitab *at-Tanbih fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:<sup>57</sup>

1. *Taujihut Tanbih*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
2. *Al-Ikmil Lima Waqa'a fi at-Tanbih min al-Isykal*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Hadlrami. (wafat: 613 H)
3. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)
4. *Raf'ut Tamwih' an Musykilatit Tanbih*, karangan Al-Dizdari. (Wafat: 643 H).
5. *Syarah Tanbih*, karangan Syafarudin Abdullah bin Muhammad al-Fihri al-Tilmisani. (Wafat: 644 H).
6. *Syarah Tanbih*, karangan Abu Muhammad al-Mundziri. (Wafat: 565H)
7. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul 'Abbas as-Sibti, Ahmad bin Yahya al-Hadlrami. (Wafat: 675 H ).
8. *Tuhfatut Thālib*, karangan Imam Nawawi. (Wafat: 676 H ).
9. *Syarah h Tanbih*, karangan Al-Disyani. (Wafat: 677 H ).
10. *Syarah Tanbih*, karangan Ibnu Nafis. (Wafat: 687 H ).
11. *Syarah Tanbih*, karangan Ibnu al-Qaliyubi. (Wafat: 689 H).
12. *Syarah Tanbih*, karangan Abul 'Abbas, Ahmad bin Abdillah al-Thabari. (Wafat: 694 H ).

---

<sup>57</sup> Siradjuddin 'Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah; Ulama Al-Syafi'i...*, hlm. 129.

13. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Ibnu Sibti, (Wafat: 710 H ).
14. *Syāraḥ h Tanbīh*, karangan Syihabuddin al-Yamani. (Wafat: 731 H ).
15. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Najmuddin al-Balisi. (Wafat: 729 H ).
16. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Burhanuddin bin Ibrahim Ibnu al-Farkah.  
(Wafat: 729 H ).
17. *Tuḥfatun Nabih fī Syarhi al- Tanbīh*, karangan syeikh Majdudin al-Sankalumi. (Wafat: 740 H ).
18. *Al-Wadlihun Nabih fī Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Manawi. (Wafat: 746 H )
19. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan ‘Alaudin bin ‘Ali bin Abdul Kafi Al-Subk i.  
(Wafat: 747 H ).
20. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan ‘Alaudin al-Subki. (Wafat: 747 H ).
21. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Abul ‘Abbas al-Nasa’i. (Wafat: 757 H ).
22. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Qadhi Jama’ah. (Wafat: 760 H ).
23. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Ibnu-al-Naqib al-Mishri. (Wafat: 758 H ).
24. *Taṣḥḥih at-Tanbīh*, karangan al-Asnawi. (Wafat: 772 H ).
25. *Nashul Faqih fī Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Mardini. (Wafat: 788 H ).
26. *Tafqiyah fī Syarhi al- Tanbīh*, karangan Qadli Jamaluddin al-Yamani.  
(24 Jilid). Wafat: 792 H .
27. *Syāraḥ Tanbīh*, karangan Zarkasyi. (Wafat: 794 H ).
28. *Irsyādun Nabih ilā Syarhi al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.  
(Wafat: 804 H ).

29. *Umniyatun Nabih Syarah al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
30. *‘Ajalut Tanb īh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
31. *Ghāyatul Faqīh fī Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
32. *Hadin Nabih fī Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.“ Sepanjang sejarah, Ibnu al-Mulqin mengarang lima buah kitab syarah atas kitab al-Tanbih” demikian diterangkan dalam Kashfu al-Zhunun.
33. *Syārah Tanbīh*, karangan Ibnu Hasyani. (Wafat: 828 H ).
34. *Syārah Tanbīh*, karangan Ibnu Shabah. (Wafat: 851 H ).
35. *Majmū’ul ‘ Usyā Syarah al-Tanbīh* karangan Khaidlari.(Wafat:894 H ).
36. *Syārah Tanbīh*, karangan Khatib Syarbani. (Wafat: 977 H ).

Sedangkan kitab *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i*. Diantara ulamayang mensyarah *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i* adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Abu Ishaq al-Iraqi (wafat: 596 H).
2. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al Muhadzdzab*.
3. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafan Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu’fī Syarh al-*

---

<sup>58</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi’iyyah, Ulama Al-Syafi’i...*, hlm. 132.

*Muhadzdzab* yang terdiri dari 12 jilid. (disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).

Sedangkan kitab *al-Muhadzdzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi, selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab*. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab* sebagai berikut:

1. Abu Ishaq al-Iraqi. (Wafat: 596 H).
2. Al-Ashbahani. (Wafat: 600 H ). Dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazzab*
3. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (Wafat: 630 H )  
Dengan nama kitabnya: *al-Musta'dzab fi Syarhi Garibi al-Muhazzab*.
4. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (Wafat: 676 H ). Dengan nama kitabnya: *al-Majmū' fi Syarhi al-Muhazzab*, yang terdiri dari 12 Jilid: kairo. (Disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).
5. Syeikh jamaluddin Al-Suyuthi. ( Wafat: 911 H ). Dengan nama kitabnya *al-Kāfi fi-Zawidil Muhazzab*.

Kitab-kitab lain karangan Abu Ishaq al-Syirazi sebagai berikut:

1. *Al-Luma'* ( Ushul Fiqh ).
2. *At-Tabsīrah* ( Ushul Fiqh ).
3. *Tabaqāt Fuqahā'* (Nama-nama ahli Fiqih).
4. *Al-Aqīdah* ( Ilmu Kalam )
5. *Al-Madzhab fil Madzhab*.



6. *Al-Ma'ūnah fil Jidāl.*
7. *Al-Mulkhish fil Jidāl.*
8. *An-Nukāt fi 'ilmil Jidāl.*
9. *Tadzkīrah al-Mas'ul īn* (Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i-Hanafi).

Selain kitab fiqh, Imam al-Syiraziyy mengarang kitab dalam bidang yang lain. Adapun kitab-kitab lain karangan Imam al-Syiraziyy adalah *Al-luma'* (ushul fiqh), *Al-Tabsirah* (ushul fiqh), *Tabaqat fuqaha* (nama-nama ahli fiqh), *Al-Aqdah* (ilmu kalam), *Al-madzhah fil madzhah*, *Al-Ma'ūnah fil Jidal*, *Al-mulkhish fil Jidal*, *An-Nukat fi al-khilaf*, dan *Tadzkirah al-Mas'ulin* (perbedaan pendapat mazhab Syafi'iyyah-Hanafiiyyah).

#### 6. Metode *Istinbath* Imam asy-Syiraziyy

Secara etimologi *istinbath* berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan hukum mempunyai arti hukum, peraturan dan kekuasaan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *istinbath* hukum adalah suatu cara yang digunakan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Imam asy-Syiraziyy termasuk dalam *ijtihad fi al-mazhab*. *Ijtihad fi al-mazhab* adalah kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *Istinbath* hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab Imam

mazhabnya, meneliti pendapat yang paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memfatwakan hukum yang diperlukan masyarakat. Adapun metode *Istinbat* Imam asy-Syirazi adalah:<sup>59</sup>

1. Firman (*Khitab*) Allah

Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran Imam asy-Syirazi terkait dengan pembahasan mengenai khitab Allah, dapat diambil dari empat dimensi, yaitu: bahasa (*al-lughat*), adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*urf*), syara, dan analogi (*qiyas*).<sup>60</sup>

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacanya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.<sup>61</sup>

3. As-Sunah

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah Al-Quran. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *zanni al-wurud*, oleh karena itu dapat dijadikan dalail jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*, (2)

---

<sup>59</sup> Amir Tajrid, 'Kajian Epistemologis Ilmu Usul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi', *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 143.

<sup>60</sup> Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.) hlm. 35

<sup>61</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1987), hlm. 23

berakal, *dlabit* (3) mendengar sendiri dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.

#### 4. Perilaku Nabi

Imam asy-Syirazy menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga hal: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain, 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali.

Dalam hal ini ulama *Usul al-Fiqh Ashabuna* terbagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya.<sup>62</sup>

#### 5. *Khabar* mutawatir

Imam asy-Syirazy membahas mengenai *akhbar* (jamak dari *khabar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi.

---

<sup>62</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.) hlm. 36.

Menurutnya, *khavar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa beliau mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab Asyariyah menafikannya. Kebenaran *khavar* mempunyai bentuknya sendiri didukung oleh pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar*, *nahi*, *khavar*, dan *istikhar*.<sup>63</sup>

Imam asy-Syirazyi membagi *khavar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *ahad*. *Khavar* mutawatir adalah *khavar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khavar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya dan mutawatir dari segi makna seperti *khavar-khavar* yang tidak sama redaksinya.

#### 6. *Ijma*

*Ijma'* merupakan satu di antara hujjah *Syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma'* dilakukan. *Ijma'* tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik kita mengetahuinya atau tidak sama sekali. Dalil tersebut dapat berupa dalil akal, al-Qur'an, Sunnah, perbuatan dan ketetapan Nabi, *qiyas*, dan seluruh metode-metode *ijtihad* lainnya.<sup>64</sup>

*Ijma* merupakan dalil bagi seluruh hukum-hukum syara' seperti ibadah, mu'amalat, pembunuhan, perkawinan, dan hukum-hukum lainnya seperti halal-haram, fatwa-fatwa, dan hukum-hukum masalah-

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.38.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.47.

masalah tertentu. Adapun hukum-hukum akal (*al-Aḥkam al-Aqliyyat*) terbagi menjadi dua: 1) wajib men-dahulukan pengamalan dari pada mengetahui (*al-‘ilm*) seperti pengetahuan tentang barunya alam, penetapan Pencipta dan sifat-sifat-Nya, penetapan kenabian, dan yang semisalnya. Pada masalah-masalah ini tidak berlaku ijma karena ijma merupakan dalil syara’ yang ditetapkan berdasarkan pendengaran (*al-sam’*). Karena itu pula tidak dibolehkan menetapkan suatu hukum yang wajib diketahui sebelum mendengarkan (*qabla ‘l-sam’*) sebagaimana tidak dibolehkannya menetapkan al-Kitab dengan al-Sunnah, sementara wajib mengamalkan al-Kitab sebelum al-Sunnah; 2) tidak wajib mendahulukan pengamalan atas mendengar (*al-sam’*) seperti kebolehan melihat Allah dan kebolehan ampunan-Nya bagi para pendosa, dan hal-hal lain yang dibolehkan mengetahui sebelum mendengarkan (*al-sam’*). Pada perkara-perkara demikian ijma’ dapat digunakan sebagai *hujah*/dalil. Adapun terkait urusan duniawi seperti pengurusan tentara, pengaturan zona perang, kota, pertanian, dan perindustrian, ijma’ tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Menurut al-Shirazi ijma’ dapat diketahui dengan ucapan dan tindakan, ucapan dan penetapan, serta per-buatan dan penetapan.

## 7. Qiyas

*Qiyas* adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam sebagian hukum- hukumnya dikarenakan makna (*illat*) yang ada pada keduanya. Hal ini karena lebih bersifat *Idtiradjami’* dan

*In'ikasmani'* dalam arti bahwa ada atau tiadanya *qiyas* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna *illat*. Jadi makna *illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.<sup>65</sup> Ini sesuai dengan kaidah *al-Hukm Yaduru Ma'a illatih Wujudan Wa'adaman*.

#### 8. Istihsan

Terkait dengan *istihsan*, Imam asy-Syirazi mengutip Imam Abu Hanifah bahwa *istihsan* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-Hukm Bima Yastahsinuh min Ghayr Dalil*). Namun Hanafiyyah ada yang mendefinisikan dengan pengkhususan *illat* karena adanya makna (alasan) yang mewajibkan adanya pengkhususan itu (*takhsis al-'illat bi ma'nan yujibu al-takhsis*), atau pengkhususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang mengkhususkannya (*Takhsis ba'd Al-jumlah min Al-jumlah bi dalil yukhassisuh*). Apabila yang dimaksudkan *istihsan* adalah *Takhsis ba'd Al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhassisuh* atau *Qawlun aw al-Hukm bi Aqwa ad Dalilain*, maka tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>66</sup>

#### 9. Istishab

*Istiṣḥab* ada dua, yaitu *istiṣḥab ḥal al-'aql* dan *istiṣḥab ḥal al-ijma'*. *istiṣḥab ḥal al-'aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab *al-ruju' ila bara'ah al-zimmah fi al-asl* atau *al-asl bara'ah al-zimmah*). Ini merupakan

---

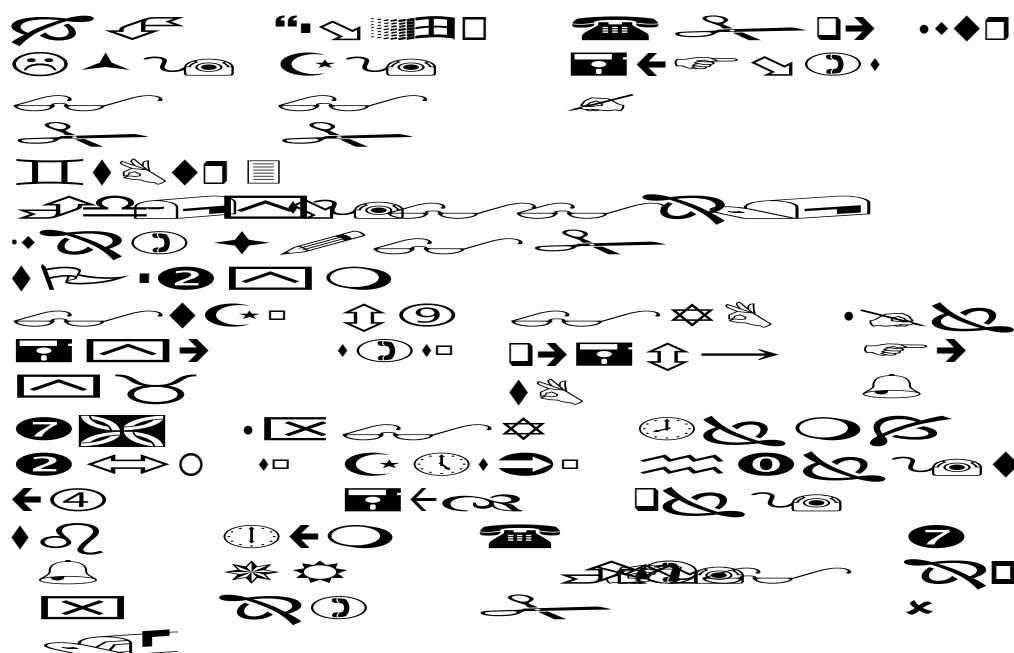
<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm.51

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.65-66.

metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil syara". Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara' yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Apapun dalil syara' yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan *istiṣḥab ḥal al-‘aql* setelah hadirnya dalil syara' tersebut.<sup>67</sup>

## B. Pendapat Asy-Syirazy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dosa besar dan merupakan tindak pidana dengan ancaman sanksi yang berat. Al-Qur'an dan hadits menetapkan larangan serta hukum keharaman pembunuhan, penjelasan tentang keharaman pembunuhan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keharaman pembunuhan, diantaranya adalah:



...nya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka

*Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

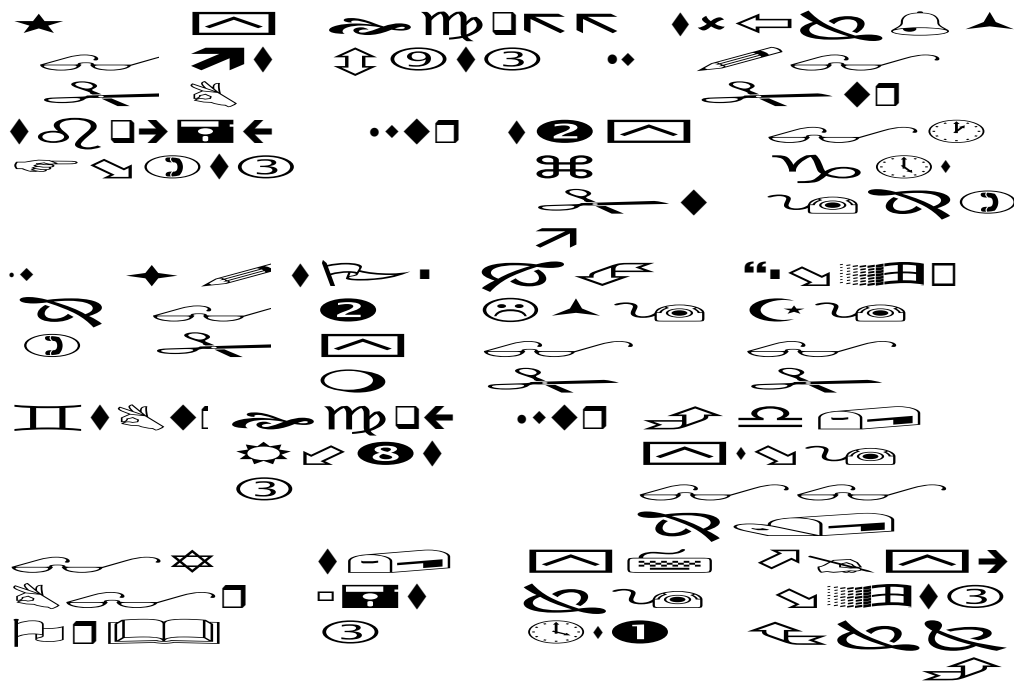
Dalam QS. Al-Isra' ayat 33, Allah melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud “membunuh jiwa” ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan maksud “yang diharamkan Allah

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.66-67.



membunuhnya” ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. Adapun sebab mengapa Allah swt melarang para hamba-Nya menghilangkan nyawa manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan ialah: Pembunuhan menimbulkan kerusakan, Pembunuhan membahayakan orang lain, Mengganggu keamanan masyarakat. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama yaitu orang yang membunuh, janda atau duda yang berzina serta orang yang meninggalkan agamanya.



Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

Pada ayat 68 Surat Al-Furqon ini orang yang tidak menyembah selain

Allah dan tidak menyekutukan-Nya dia benar-benar beribadah kepada Allah, dan mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap siapapun karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Mereka tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak yang ditetapkan oleh Allah seperti orang

yang murtad atau membunuh orang tanpa hak. Mereka tidak akan berbuat zina karena menyadari bahwa zina termasuk dosa besar. Serta apabila seseorang melakukan yang dilarang oleh Allah maka akan mendapat azab yang sangat pedih yaitu neraka.

Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja adalah adanya hukuman *qishas*. Namun, pelaksanaan hukuman *qishas* diserahkan pada keputusan keluarga korban (terbunuh), apakah tetap dilaksanakan *qishas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar dengan penggantian yang ditetapkan keluarga si terbunuh.

Dalam kaitanya dengan pembunuhan melalui perantara, menurut Imam asy-Syirazi dalam karangannya kitab *al-Muhazzab* mengatakan :

وان امر الإمام بقتل رجل بغري حق، وان كان أملاً لم ير ال يلم ان نلله بغري حق، وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية علي الإمام، ألن المأمور م عذور ب نلله، ألن الظاهر ان الإمام ال أيمر ال اخلق. وان كان يلم أنه بقتل بغري حق، وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص او الدية علي المأمور، إلنه ال جيز طاعته نهم ال حيل.

Artinya: “Jika seorang penguasa menyuruh seseorang laki-laki untuk membunuh tanpa haqq, maka apabila seseorang yang diperintah tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa haqq, maka hukuman kafarat, qishas, diyat wajib ditanggung oleh penguasa. Karena orang yang diperintah dimaafkan dalam pembunuhannya. Dan karena seorang penguasa tidak boleh memerintah kecuali dengan haqq (benar). Dan apabila seorang yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa haqq, maka yang wajib menanggung hukuman kafarat, qishas atau diyat adalah seorang yang disuruh. Karena tidak boleh mematuhi sesuatu yang tidak halal”<sup>68</sup>

Adapun Imam al-Imrani dan Imam Nawawi al-Bantani yang juga bermadzhab Syafi’iyyah juga sependapat dengan asy-Syirazi terkait dengan

---

<sup>68</sup> Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi’iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 27-28.

hukuman mematuhi perintah Imam untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.<sup>69</sup>

Adapun perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan ada tiga macam yaitu:

4. Perbuatan langsung, *fuqaha'* mendefinisikan bahwa pembunuhan langsung adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebab tanpa perantara yang lain. Misalnya menyembelih dengan pisau, menyembelih merupakan hal yang membawa kematian dan sebagai faktor yang mematikan.
5. Sebab, *fuqaha'* mendefinisikan bahwa sebab adalah setiap perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya ia sebagai *ilat* (*causa*/penyebab kematian tetapi bukan menjadi penyebab langsung, melainkan sebagai perantara. Sebab ada tiga macam yaitu:
  - 4) Sebab secara inderawi (*hissi*), seperti membuat orang yang dipaksa atau yang diperintah melakukan pembunuhan.
  - 5) Sebab Syara'i seperti kesaksian palsu atas pembunuhan, kesaksian ini menyebabkan hakim memutuskan hukuman mati.
  - 6) Sebab '*urf* (adat kebiasaan), menyebabkan kematian langsung seperti menggali lubang ditengah jalan dan menutupnya sehingga menimbulkan korban, sesungguhnya galian lubang adalah penyebab kematian tetapi bukan lubang tersebut yang mematikan

---

<sup>69</sup> Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim al-Imrani al-Syafi'i al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Dar al-Minhaj Jilid 11, Hlm. 349.

korban, yang membuatnya mati adalah terperosoknya korban kedalam lubang tersebut.

6. Syarat, syarat adalah setiap perbuatan yang tidak mempengaruhi (menimbulkan) kematian dan tidak menyebabkannya, namun kematian terjadi karena sebab lain yang mempengaruhi kematian. Misalnya ada orang yang melemparkan orang lain ke dalam sumur yang digali oleh orang ketiga tanpa maksud ingin membunuh, orang yang dilempar menjadi mati, yang menjadi penyebab kematian sesungguhnya adalah lemparan tersebut bukan galian tersebut. Akan tetapi lemparan tadi tidak mungkin memiliki dampak kematian jika tidak ada sumur.<sup>70</sup>

Dalam kondisi tertentu, pembunuhan tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat dan aturan. Ada dua kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, yaitu membunuh ketika peperangan dan membunuh ketika menghukum. Nabi SAW telah menjelaskan maksud pembunuhan yang *haqq* dalam hadits :

[illegible]

Artinya: Dari Abdullâh (bin Mas'ud), ia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi Lâ Ilâha illa Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, kecuali dengan satu dari tiga (perkara): (1) satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain, (2) orang yang sudah menikah

<sup>70</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina'I al-Islami* (Muassasah Ar-Risalah, tt), 203-204.

yang berzina, (3) orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jama'ah (Muslimin)". [HR Bukhari, no. 6484; dan Muslim, no. 1676].

### **C. *Istinbath* Imam Asy-Syiraziyy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

*Istinbath* berasal dari kata "*nabth*" yang berarti : "air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali". Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya".<sup>71</sup> Sedangkan secara *istilah* adalah "mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul".

Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi "upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya". Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. Dalam penetapan hukum Islam, sumber rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu: *nash* dan *ghairual-nash*.<sup>72</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam asy-Syiraziyy dalam berpendapat tersebut adalah hadits. Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25

<sup>72</sup> Muhammad Hamim Ma'rifatulloh "Mutiarah Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail" dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 21 oktober 2019.

الطاعة لله وحده  
والطاعة لرسوله  
والطاعة لولاة الامر

Artinya: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.”<sup>73</sup>

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara’ yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.<sup>74</sup>

Adapun cara mengkonstruksikan *istinbath* hukum, para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadits-hadits dalam upaya lebih mendekatkan kepada maksud-maksud persyariaan hukum disatu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada ditengah masyarakat di pihak lain secara umum. Metode penalaran itu dapat dibagi ke dalam dua pola:

---

<sup>73</sup> Sebagaimana dalam Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi’iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 28.

<sup>74</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitabal-Fiqh’ala-Madzahibal-Arba’ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah), hal. 25.



## **1. Segi Kebahasaan (*Istinbath Bayani*)**

Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur'an dan Hadits memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh menunjukkan pemahaman dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai makna.

Hal yang menjadi perhatian para ahli usul fiqh dalam *istinbath* kebahasaan adalah pengertianal-lafz (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan posisi lafadz itu dalam kalimat. Para ulama membahasnya secara mendalam bahkan membaginya kedalam beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili, 'Abd al- Wahhab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokkannya dalam beberapakategori yaitu:

- a) lafadz dilihat dari cakupan maknanya,
- b) lafadz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna dan
- c) lafadz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran.

### **1) Lafaz dari segi cakupan maknanya**

Dari segi cakupan maknanya, lafaz dapat dibedakan menjadi:

- a) Lafaz khas

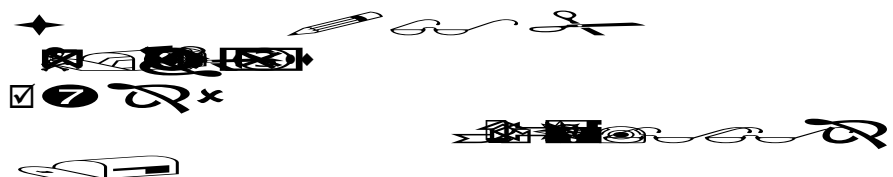
Lafaz Khas adalah suatu lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal.<sup>75</sup> Sedangkan ulama' ushul mendefinisikan lain-lain tetapi hakekatnya sama. Definisi yang dapat dikemukakan disini yaitu: "Lafaz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri"<sup>76</sup>

Lafadz yang terdapat pada nash syara' menunjukkan satu makna tertentu dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya itu. Oleh karena itu, apabila lafadz khas dikemukakan dalam bentuk mutlak, tanpa batasan apapun, maka lafaz itu memberi faedah ketetapan hukum secara mutlak, selama tidak adadalil yang membatasinya. Jadi jika lafaznya mengandung nahi (larangan), ia memberikan faedah berupa hukum haram terhadap hal yang dilarang itu selama tidak ada *qarinah* (indikasi) yang memalingkannya dari hal itu.

#### b) *Mutlaq*

Secara bahasa *mutlaq* berarti bebas tanpa ikatan, secara istilah lafaz *mutlaq* adalah kata yang khusus yang tidak dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.<sup>77</sup>

Salah satu contoh *mutlaq* adalah firman Allah QS. al-Maidah/5: 89



<sup>75</sup> Amir  
Syarifuddin,  
*Ushul  
Fiqhi*, Jilid  
I, (Jakarta:  
Kencana,  
2008),  
Hlm.83

<sup>76</sup>  
Muhammad  
Khudhari  
Beyk, *Ushul  
Fiqhi*, (Cairo,  
Maktabah al-  
Istiqamah,  
1938),

<sup>77</sup> Ali  
Hasballah,  
*Ushul al-  
tasyri' al-  
Islami*, (Kairo:  
Dar al-  
Ma'rifah,  
1971 ),  
Hlm.225



“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah

*kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*

Kata *tahrir raqabah* tidak disertai sifat apapun, sehingga orang yang melanggar sumpah boleh memerdekakan budak laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Hukum lafaz *mutlak* tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi cakupan maknanya.

c) *Muqayyad*

*Muqayyad* secara etimologi berarti terbatas, tertentu. Secara terminologi adalah lafaz yang menunjuk pada satuan yang tidak tertentu tetapi lafaz itu dibarengi dengan sifat yang membatasi

maksudnya.<sup>78</sup> Lafaz yang *muqayyad* adalah kata khusus yang dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.<sup>79</sup>

d) *Al-Amr*

*Al-Amr* secara etimologi berarti perintah, lawan kata larangan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *al-amr*. Beberapa definisi berikut:

(1) Imam al-Ghazali, *al-amr* adalah ucapan atau tuntutan-yang secara substansial-agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutan-yang dalam perbuatan.<sup>80</sup>

(2) Hafizzuddin al-Nasafi mendefinisikan *al-amr* sebagai titah seseorang yang posisinya lebih tinggi kepada orang lain.<sup>81</sup> Pernyataan Hafizzuddin ini senada dengan pernyataan Mu'tazilah<sup>82</sup> yang mensyaratkan kedudukan pihak yang memerintah harus lebih tinggi dari pihak yang diperintah karena apabila kedudukan yang memerintah lebih rendah dari yang diperintah, maka tidak disebut *al-Amr* tapi *do'a*.

---

<sup>78</sup> Muhammad Khudhari Beyk, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, (Cairo: Dar Ihya Al-Kutub, 1930), Hlm.298

<sup>79</sup> Muhammad Khudhari Beyk, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, Hlm. 298

<sup>80</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Hlm. 175

<sup>81</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Hlm. 176

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 162

Jadi *al-amr* adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini, dilihat dari segi sumbernya, berasal dari posisi yang lebih tinggi kedudukannya. *Al-Nahy* secara etimologi adalah lawan dari *al-amr* berarti larangan atau cegahan. Banyak ulama yang mendefinisikan makna *al-nahy*, di antaranya:<sup>83</sup>

- a. Zaky al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa *al-nahy* ialah sesuatu tuntutan yang menunjukkan larangan untuk berbuat.
- b. Imam Abu Zahrah menyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan *al-nahy* adalah tuntutan yang berisi larangan atau cegahan untuk melakukan perbuatan.<sup>84</sup>

Pengertian yang dikemukakan para ulama di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa *al-nahi* adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang bentuknya larangan atau mencegah agar tidak melakukan perbuatan dan larangan yang datangnya dari *syar'i* yang telah dituangkan dalam *nash* yaitu al-Quran dan al-Sunnah.

e) *Musytarak*

*Musytarak* adalah lafaz yang mempunyai dua makna atau lebih. Lafaz *musytarak* adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat

---

<sup>83</sup> Zakiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1961), Hlm.102

<sup>84</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., t.th) Hlm.278.

menunjukkan artinya secara bergantian. Artinya lafaz itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafaz *a'in* عني menurut bahasa bisa berarti mata, sumber mata air, dan mata-mata. Lafaz *quru'* menurut bahasa bisa berarti suci atau haid.

## 2) *Lafaz dari Segi Penggunaan Maknanya*

Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi ke dalam empat bagian yaitu *haqiqi*, *majazi*, *sarih* dan *kinayah*.

### a. *Haqiqi* dan *Majazi*

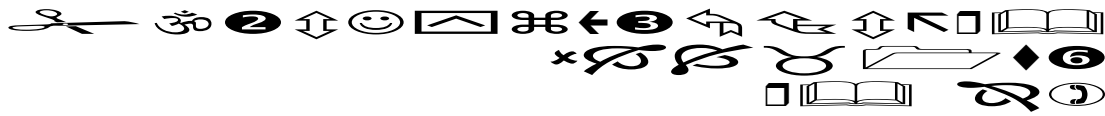
*Haqiqi* adalah lafaz yang menunjukan arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan kepada *qarinah-qarinah* tertentu. Sedangkan *majazi* adalah lafaz yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya karena *qarinah* yang memalingkannya atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna yang sebenarnya.

Setiap lafaz *haqiqi* harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya baik bersifat *amm*, *khas*, *amr*, ataupun *nahy* selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan makna yang sebenarnya.

Lafaz *irka'u* dan *usjudu* dalam ayat di atas adalah ruku'dan sujud dalam arti yang sebenarnya, tidak ada indikasi yang menunjukan pengalihan arti kedua lafaz tersebut kepada arti lain.

Berbeda dengan lafaz *majazi*, ia diamalkan sebagaimana berikut ini:





"Sesungguhnya Aku bermimpi, bahwa Aku memeras anggur."

Memahami sepenggal ayat di atas dengan makna *haqiqi* tidaklah tepat sebab khmar adalah benda cair yang tidak mungkin diperas. Oleh karena itulah para ulama mengartikan ayat tersebut dengan makna *majazi* yaitu memeras anggur.<sup>85</sup>

#### b. *Sarih* dan *Kinayah*

Lafadz *sarih* dan *kinayah* sesungguhnya merupakan bagian dari lafaz *haqiqi* dan *majaz*. Yang dimaksud dengan lafaz *sarih* adalah lafaz yang maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti *haqiqi* atau arti *majazi*. Sedangkan yang dimaksud dengan *kinayah* adalah lafaz yang tersembunyi maksudnya baik secara *haqiqi* atau *majazi*.

Lafaz yang *sarih* berakibat hukum secara langsung tanpa bergantung kepada yang lain. Misalnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku cerai". Dengan perkataan tersebut cerai dari suami terhadap istri telah terjadi talak satu meskipun tidak disertai niat.<sup>86</sup>

Berbeda dengan lafaz *sarih*, keberlakuan lafaz *kinayah* sangat bergantung pada niat. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "pulanglah ke rumah orang tuamu". Ucapan ini bergantung pada niat suami ketika mengatakannya. Jika ia

<sup>85</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), Hlm. 255

<sup>86</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm. 308-309

bermaksud menceraikan istrinya dengan perkataan itu berarti telah jatuh talak. Jika suami tidak meniatkan untuk menceraikan, maka cerai pun tidak terjadi.<sup>87</sup>

### 3) *Lafaz dari segi kejelasan dan kesamaran petunjuknya*

Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya (*dalalah*), lafaz dibedakan menjadi dua yaitu lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*) dan lafaz yang samar penunjukannya (*khafiy al-dalalah*)

Lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*), adalah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna dengan menggunakan lafaznya sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal.<sup>88</sup>

Lafaz dalam jenis ini terbagi kedalam empat bagian yaitu *zahir*, *nas*, *mufassar*, dan *muhkam*.<sup>89</sup> Yang dimaksud dengan lafaz *zhahir* adalah lafaz yang menunjukan terhadap sesuatu makna dengan shigatnya sendiri tanpa membutuhkan *qarinah* hal yang bersifat *khariji* (external), akan tetapi makna itu bukanlah makna yang sebenarnya yang dikehendaki dari susunan kalimatnya dan ia mengandung kemungkinan ta'wil.<sup>90</sup>

## 2. Segi *Maqashid asy-syari'ah*

Para ulama ushul fiqh berpandangan bahwa metode *istinbath* disamping dilihat dari segi kebahasaan, juga melalui ruh tasyri' atau *Maqashid asy-syari'ah*. Melalui metode inilah ayat-ayat dan hadits-hadits

---

<sup>87</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm. 309

<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm. 312

<sup>89</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Hlm. 162

<sup>90</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Hlm. 162

hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara kebahasaan tidak tertampung al-Qur'an dan Sunnah.

Pemahaman terhadap *Maqashid asy-syari'ah*, sangat penting seperti yang ditegaskan Abd Wahhab Khallaf, karena dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan.<sup>91</sup>

*Maqashid asy-syari'ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Sedangkan menurut istilah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>92</sup>

Metode penetapan hukum melalui *maqashid asy-syari'ah* dalam praktiknya selain menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber juga menggunakan metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah (masalah mursalah)*, *istishab*, *sadd al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan). Disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid asy-syari'ah* oleh sebagian ulama *ushul fiqh* disebut sebagai dalil-dalil pendukung.<sup>93</sup>

Penetapan hukum melalui *Maqashid asy-syari'ah* dapat dilakukan melalui metode *istinbath ta'lili* dan metode *istinbat} istilahi*.

---

<sup>91</sup> Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, cet ke-15, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984), Hlm. 205

<sup>92</sup> Fathurrahman Djamil, *filsafat hukum Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 123

<sup>93</sup> Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu ushual-Fiqh.*, Hlm.215

a. Metode *istinbath ta'lili*

Metode *istinbath ta'lili* adalah metode *istinbath* yang bertumpu pada 'illah disyariatkannya suatu ketentuan hukum.<sup>94</sup> Pemahaman dan penalaran ini didasarkan pada anggapan ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah swt untuk mengatur perilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah swt tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Pada umumnya tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia hidup di dunia dan diakhirat. Namun lebih khusus dipahami bahwa setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Ada yang disebutkan langsung di dalam al-Qur'an dan hadits, sebagian diisyaratkan dan ada pula yang direnung dan dipikirkan lebih dahulu.<sup>95</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat sekarang. Seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis ini dinamakan '*illat* atau *mana*}' *al-hukm* (proses hukum).

b. Metode *Istislahi*

Penalaran *istislahi* perpanjangan dari penalaran *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan pada anggapan bahwa Allah swt menurunkan

---

<sup>94</sup> Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'ilm Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus), Hlm.1959

<sup>95</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqfi'in*, dengan tahqiq Thaha Abd al-Rauf sa'd, al Hajj 'Abd al Salam Ibn Muhammad Ibn Syakrun, (kairo: 1968), Hlm.196

aturan dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Metode *istinbath Istishlahi* adalah pola *istinbath* yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-dalil khusus mengenai suatu persoalan baik dari al-Qur'an atau al-Hadis dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah *Istishlahi* atau *mashlahah mursalah*. *Mashlahah* secara harfiah berarti keadaan yang baik dan bermanfaat. *Mursalah* berarti netral.<sup>96</sup> *Mashlahah mursalah* adalah masalah yang tidak ditetapkan dalam nas} yang secara khusus menyatakan penerimaan atau penolakan.

*Mashlahah* pada dasarnya dibagi kepada tiga yaitu: 1) *mashlahah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang dinyatakan nas} melalui 'illah. 2) *Mashlahah Mulgah*, yaitu kemaslahatan dilihat oleh manusia sebagai kemaslahatan namun ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara. 3) *Mashlahah Mursalah*, yaitu Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan syara melalui dalil terinci.<sup>97</sup>

Penerapan *al-mashlahah* sebagai metode penetapan hukum Islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-mashlahah mursalah*, *al-istishhab*, *adz-dzariah* dan *urf*. Dengan kata lain pada hakekatnya keenam bentuk dalil yang disebutkan juga

---

<sup>96</sup> Muhammad Salam Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Universitas Kuwait, 1974), Hlm. 280

<sup>97</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mat}ba'ah al-Nahdah, 1976), Hlm. 15-17

merupakan metode-metode pengembangan hukum Islam berdasarkan  
*maqashid asy-syari'ah Istinbath*.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *irsyad al-fuhul...*, Hlm.238.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI**  
**PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN**

**D. Pendapat Asy-Syirazy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syari'at Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.<sup>99</sup>

Dengan demikian, perbuatan *jarimah* atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok. Seperti halnya turut serta melakukan *jarimah* adalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan maupun keluasan.<sup>100</sup> Sehingga Turut serta berbuat *jarimah* dalam hukum Islam berada dalam empat kemungkinan, yakni:

---

<sup>99</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: SinarrGrafika, 2009), h. 7

<sup>100</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam ...*, h. 217

- e. Pelaku melakukan *jarimah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- f. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- g. Orangyang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.
- h. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.<sup>101</sup>

Sehingga pengertian turut serta melakukan *jarimah* dalam hukum Islam adalah melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasaan dengan berbagai bentuk. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan turut serta meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan *jarimah*.<sup>102</sup>

Pengertian turut serta berbuat adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil dari pada peristiwa *jarimah*. Pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan perbuatan *jarimah* ialah sama-sama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki. Dimana suatu kejahatan

---

<sup>101</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam ...*, h. 225

<sup>102</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), h. 55



kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.<sup>103</sup>

Dalam kaitanya dengan pembunuhan melalui perantara atau turut serta, menurut Imam asy-Syirazy dalam karangannya kitab *al-Muhazzab* mengatakan :

وان امر الإمام بقتل رجل بغري حق، وان كان أمراً لم يعلم أن قتله بغري حق، وجب ضمان القتل من الكفارة والقيصاص والدية علي الإمام، ألن الأمور مذنوب قتله، ألن الظاهر أن الإمام ال أيمر ال ابلق. وان كان يعلم أنه يقتل بغري حق، وجب ضمان القتل من الكفارة والقيصاص او الدية علي الأمور، إلنه ال جيز طاعته نيم ال حيل.

Artinya: “Jika seorang penguasa menyuruh seseorang laki-laki untuk membunuh tanpa haqq, maka apabila seseorang yang diperintah tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa haqq, maka hukuman kafarat, qishas, diyat wajib ditanggung oleh penguasa. Karena orang yang diperintah dimaafkan dalam pembunuhannya. Dan karena seorang penguasa tidak boleh memerintah kecuali dengan haqq (benar). Dan apabila seorang yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa haqq, maka yang wajib menanggung hukuman kafarat, qishas atau diyat adalah seorang yang disuruh. Karena tidak boleh mematuhi sesuatu yang tidak halal”<sup>104</sup>

Dari pendapat Imam asy-Syirazy tersebut dapat dipahami bahwa apabila seorang penguasa menyuruh bawahan atau suruhannya untuk membunuh orang lain dengan tanpa *haqq*, maka terkait dengan pertanggungjawaban pidananya harus mempertimbangkan dulu terkait dengan orang yang disuruh tersebut mengetahui atau tidaknya bahwa pembunuhan yang diperintah merupakan pembunuhan tanpa *haqq*. Jika yang diperintah

---

<sup>103</sup> Hamzah Hasan, *Hukum...*, h. 226

<sup>104</sup> Abi Ishaq asy-Syirazy, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 27-28.

mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka hukuman diberikan kepada yang diperintah. Namun apabila orang yang diperintah tidak mengetahui kalau pembunuhannya merupakan pembunuhan *haqq*, maka hukuman diberikan kepada si penyuruh atau penguasa.

Dari penetapan hukum menurut Imam asy-Syiraziyy tersebut, menurut penulis setuju dengan pendapat tersebut, namun tidak secara mutlak atau keseluruhan. Apabila dalam hal si penguasa menyuruh bawahannya untuk melakukan pembunuhan dan yang disuruh tidak mengetahui kalau pembunuhannya tanpa *haqq*, maka dalam hal ini penulis sependapat dengan Imam asy-Syiraziyy, yaitu hukuman *qishas*, *diyat* dan *kafarat* diberikan kepada yang menyuruh. Namun menurut penulis, yang disuruh tetap mendapatkan hukuman, karena bagaimanapun ia adalah pelaku pembunuhan, meskipun pembunuhannya bukan atas kehendaak sendiri. Dalam hal ini yang disuruh dapat dikenakan hukuman *diyat*, karena ia secara langsung telah menghilangkan nyawa. Karena pula tidak sepatutnya melaksanakan perintah yang mengarah kepada perbuatan bathil, sekalipun yang nyuruh adalah atasan. Hal ini sesuai hadits Nabi yaitu sebagai berikut :

الطَّاعَةُ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَخْلُوقِ  
لِلَّهِ فِي مَخْلُوقِ

Artinya: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.”<sup>105</sup>

Adapun apabila dalam hal yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka dalam hal ini penulis juga sependapat

---

<sup>105</sup> Sebagaimana dalam Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 28.

dengan Imam asy-Syirazy, yaitu hukuman *qishas*, *diyat* maupun *kafarat* diberikan kepada yang disuruh. Akan tetapi dalam hal ini penulis berpendapat kalau dalam hal tersebut, hukuman juga diberaiakan kepada yang disuruh, karena bagaimanapun adanya peristiwa pidana pembunuhan tersebut berawal dari penguasa yang menyuruh. Artinya ia (pengusa) menjadi sebab pertama adanya pembunuhan tersebut. Namun hukuman yang diberikan bukanlah hukuman pokok, akan tetapi hukuman pengganti, yaitu *diyat*.

Adapun perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan ada tiga macam yaitu:

7. Perbuatan langsung, *fuqaha'* mendefinisikan bahwa pembunuhan langsung adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebab tanpa perantara yang lain. Misalnya menyembelih dengan pisau, menyembelih merupakan hal yang membawa kematian dan sebagai faktor yang mematikan.
8. Sebab, *fuqaha'* mendefinisikan bahwa sebab adalah setiap perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya ia sebagai *ilat* (*causa*/penyebab kematian tetapi bukan menjadi penyebab langsung, melainkan sebagai perantara. Sebab ada tiga macam yaitu:
  - 7) Sebab secara inderawi (*hissi*), seperti membuat orang yang dipaksa atau yang diperintah melakukan pembunuhan.
  - 8) Sebab Syara'i seperti kesaksian palsu atas pembunuhan, kesaksian ini menyebabkan hakim memutuskan hukuman mati.

- 9) Sebab ‘*urf*’ (adat kebiasaan), menyebabkan kematian langsung seperti menggali lubang ditengah jalan dan menutupnya sehingga menimbulkan korban, sesungguhnya galian lubang adalah penyebab kematian tetapi bukan lubang tersebut yang mematikan korban, yang membuatnya mati adalah terperosoknya korban kedalam lubang tersebut.
9. Syarat, syarat adalah setiap perbuatan yang tidak mempengaruhi (menimbulkan) kematian dan tidak menyebabkannya, namun kematian terjadi karena sebab lain yang mempengaruhi kematian. Misalnya ada orang yang melemparkan orang lain ke dalam sumur yang digali oleh orang ketiga tanpa maksud ingin membunuh, orang yang dilempar menjadi mati, yang menjadi penyebab kematian sesungguhnya adalah lemparan tersebut bukan galian tersebut. Akan tetapi lemparan tadi tidak mungkin memiliki dampak kematian jika tidak ada sumur.<sup>106</sup>
- Dalam kondisi tertentu, pembunuhan tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat dan aturan. Ada dua kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, yaitu membunuh ketika peperangan dan membunuh ketika menghukum. Nabi SAW telah menjelaskan maksud pembunuhan yang *haqq* dalam hadits :

---

<sup>106</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina' I al-Islami* (Muassasah Ar-Risalah, tt), 203-204.

Artinya: Dari Abdullâh (bin Mas'ud), ia berkata: Rasûhullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi Lâ Ilâha illa Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, kecuali dengan satu dari tiga (perkara): (1) satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain, (2) orang yang sudah menikah yang berzina, (3) orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jama'ah (Muslimin)". [HR Bukhari, no. 6484; dan Muslim, no. 1676].

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam juga diakui keberadaannya karena sebab beberapa hal, dengan pengertian lain bahwa pertanggungjawaban dapat dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut meliputi perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang (kejahatan). Perbuatan melawan hukum sendiri dalam hukum Islam terdapat tingkatan (klasifikasi), hal tersebut bermula dari bagaimana perbuatan dilakukan dan dengan konsekwensi adanya pertanggungjawaban juga berbeda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat dikategorikan dalam 3 hal perbuatan, yakni:

Pembahasan mengenai perbuatan yang sengaja, dalam hukum pidana Islam lebih banyak berkaitan dengan *jarimah* pembunuhan, akan tetapi pada kejahatan lain, tingkatan yang demikian juga sebenarnya dapat diberlakukan. Misalnya dalam hal pencurian, minum *khamr*, dan lain sebagainya. Karena kesengajaan (*dolus*) sendiri dalam hukum pidana

masuk sebagai unsur subjektif atau unsur yang melekat pada diri pelaku kejahatan. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan menghendaki akibat dari perbuatannya yakni kematian dari orang yang dibunuh (korban). Tentu saja pertanggungjawaban pada perbuatan karena sengaja lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang berada ditingkat bawahnya.<sup>107</sup>

e. Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdu*)

Pengertian perbuatan pidana menyerupai sengaja (*syibhul 'amdu*) adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdu* adalah dikaitkan dengan alat yang digunakan oleh pelaku. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa untuk membunuh, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyerupai sengaja.

f. Tidak sengaja (*syibhul khata*)

Perbuatan pidana karena tidak sengaja termasuk kategori perbuatan karena kekeliruan, yakni terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena pelaku kurang hati-hati.

Terkait dengan pendapat asy-Syirazy, yaitu jika seorang pemimpin menyuruh seseorang untuk melakukan pembunuhan, ketika yang disuruh

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 405.

mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka hukuman dibebankan kepada yang disuruh, dan apabila yang disuruh tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka yang wajib dihukum adalah yang menyuruh. Pada intinya keduanya sama-sama punya keterlibatan untuk melakukan pembunuhan. Menurut penulis, keduanya (yang menyuruh dan yang disuruh) sama-sama terbebani pertanggungjawaban pidana atas kematian si terbunuh, akan tetapi kadar hukumannya berbeda. Melihat teori *jarimah qishas-diyat*, macam-macam pembunuhan berbeda-beda beserta dengan hukumannya. Peristiwa dalam pendapatnya asy-Syiraziyy, menurut penulis seorang yang menyuruh dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi tidak hukuman *qishas*. Karena ia tidak melakukan secara langsung dan tergolong pembunuhan *syibhul 'amd*. Adapun orang yang disuruh untuk melakukan pembunuhan adalah dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan hukuman *qishas* berlaku baginya, karena ia melakukan secara langsung, dengan niat menghilangkan nyawanya walaupun atas perintah atasanya, namun unsur pembunuhan disengaja telah terpenuhi.

#### **E. *Istinbath* Imam asy-Syiraziyy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui

perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.<sup>108</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam asy-Syiraziyy dalam berpendapat tersebut adalah hadits. Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut :

الْطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ فِي شَأْنِ اللَّهِ  
وَالْإِطَاعَةُ لِلْإِمَامِ فِي شَأْنِ اللَّهِ  
وَالْإِطَاعَةُ لِلْإِمَامِ فِي شَأْنِ اللَّهِ  
ق

Artinya: *“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.”*<sup>109</sup>

Hadits tersebut digunakan oleh asy-Syiraziyy dalam pendapatnya tentang perintah atasan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Secara tekstual, hadits tersebut tidak mengarah secara spesifik tentang perintah atasan untuk melakukan pembunuhan. Namun hadits tersebut memberikan gambaran bahwa tidak boleh mengikuti perintah yang mengarah kepada perbuatan maksiyat kepada Allah. Seperti halnya perintah untuk melakukan pembunuhan, karena membunuh tanpa *haqq* juga merupakan perbuatan maksiyat kepada Allah.

Seperti dalam pendapatnya Imam asy-Syiraziyy, terkait dengan seorang atasan yang memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, sekalipun yang menyuruh adalah atasan, dalam hal ini tetap

<sup>108</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitabal-Fiqh'ala-Madzahibal-Arba'ah, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah), hal. 25.



<sup>109</sup> Sebagaimana dalam Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 28.

tidak boleh. Karena pembunuhan yang diperintahkan adalah pembunuhan tanpa *haqq* atau tanpa dibenarkan. Jadi, perbuatan penguasa yaitu (menyuruh) untuk melakukan pembunuhan disini merupakan perbuatan maksiyat. Artinya “perbuatan maksiyat” itulah yang menjadi *illat* atau sebab tidak boleh diikutinya perintah-perintah darinya, yaitu si penguasa yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan tanpa *haqq*.

Implikasi hukum dari hadits tersebut adalah seseorang tidak boleh menjalankan perintah melakukan pembunuhan tanpa *haqq*, dan apabila ia melakukan sementara ia tahu bahwa pembunuhan tersebut tanpa *haqq*, maka ia akan mendapatkan hukuman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Imam asy-Syirazy berpendapat yaitu jika seorang pemimpin menyuruh seseorang untuk melakukan pembunuhan, ketika yang disuruh mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka hukuman dibebankan kepada yang disuruh, dan apabila yang disuruh tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka yang wajib dihukum adalah yang menyuruh. Pada intinya keduanya sama-sama punya keterlibatan untuk melakukan pembunuhan. Menurut penulis, keduanya (yang menyuruh dan yang disuruh) sama-sama terbebani pertanggungjawaban pidana atas kematian si terbunuh, akan tetapi kadar hukumannya berbeda. Terkait dengan yang disuruh tetap mendapatkan hukuman, karena bagaimanapun ia adalah pelaku pembunuhan, meskipun pembunuhannya bukan atas kehendaak sendiri. Dalam hal yang disuruh tidak tahu bahwa pembunuhannya tanpa *haqq*, maka dapat dikenakan hukuman *diyat*, karena

ia secara langsung telah menghilangkan nyawa, walaupun tidak atas kehendaknya sendiri. Adapun jika dalam keadaan tidak tahu, maka hukuman pokok (*qishas*) diberikan kepada atasan yang menyuruh. Dan yang disuruh tetaplah mendapatkan hukuman, akan tetapi bukan hukuman pokok, melainkan hukuman *diyat*.

2. Dalam pendapat tersebut, Imam asy-Syirazy berdasar kepada hadits yaitu : *“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.”* Hadits tersebut digunakan oleh asy-Syirazy dalam pendapatnya tentang perintah atasan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Secara tekstual, hadits tersebut tidak mengarah secara spesifik tentang perintah atasan untuk melakukan pembunuhan. Namun hadits tersebut memberikan gambaran bahwa tidak boleh mengikuti perintah yang mengarah kepada perbuatan maksiyat kepada Allah. Seperti halnya perintah untuk melakukan pembunuhan, karena membunuh tanpa *haqq* juga merupakan perbuatan maksiyat kepada Allah. Implikasi hukum dari hadits tersebut adalah seseorang tidak boleh menjalankan perintah melakukan pembunuhan tanpa *haqq*, dan apabila ia melakukan sementara ia tahu bahwa pembunuhan tersebut tanpa *haqq*, maka ia akan mendapatkan hukuman.

## **B. Saran-Saran**

1. Apa yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk memberikan informasi tentang pendapat dan *istinbath* hukum asy-Syiraziyy khususnya terkait dengan hukuman bagi palaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Dari metode *istinbath* hukum yang ada, hendaknya menyesuaikan dengan situasi masyarakat saat menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan musyawarah dari para ahli hukum sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat.
3. Dalam menentukan hukuman hendaknya harus berhati-hati, pertimbangan yang diambil haruslah menyeluruh dari berbagai aspek, tidak hanya aturan yang sudah terkodifikasi dalam bentuk Undang-undang. Akan tetapi haruslah juga melihat tujuan dari pada hukuman itu sendiri menyesuaikan dengan apa yang dilakukan.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitabal-Fiqh‘ala-Madzahibal-Arba’ah, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah)
- Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitabal-Fiqh‘ala-Madzahibal-Arba’ah, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah), Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, cet ke-, (Kuwait: Dar al-Qalam, )
- Abdul Qadir Audah , *Al-Tsyri’ Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, ), Jilid I,
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri’ al-jina’I al-Islami* (Muassasah Ar-Risalah, tt)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-Qalam, ),
- Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh*
- Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim al-Imrani al-Syafi’i al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhah al-Imam al-Syafi’i*, Dar al-Minhaj Jilid , .
- Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi’iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, -.
- Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazy, *al-Luma’*, (Semarang: Thoha Putra,t.t,)
- Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali asy-Syirazy, *al-Luma’*, (Semarang: Thoha Putra,t.t,)
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, , .
- Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-, )
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, ) cet. , .
- Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma’arif,)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, ),
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, jilid* , (Ciputat: Logos Wacana Ilmu , ),
- Amir Tajrid, ,Kajian Epistemologis Ilmua Usul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi’, *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume , Nomor , Okteober , .

Ayu Lestari, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Program Studi Jinayah Siyasah fakultas Syari'ah dan Hukum universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatahpalembang,

Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, , .

edeRosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, , h. .

Fathurrahman Djamil, *filasafat hukum Islam*, cet. Ke- (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, ),

Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, ),

Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mat}ba'ah al-Nahdah, ), -

bnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, ,

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, dengan tahqiq Thaha Abd al-Rauf sa'd, al Hajj 'Abd al Salam Ibn Muhammad Ibn Syakrun, (kairo: ),

Jannatun Naimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No./Pid.Sus/0/Pt.Tpk.Smg.), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang,

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, ), .

Kiswandhi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal Kuhp Tentang menyuruh melakukan Tindak Pidana, Iain Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah, .

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , .

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., t.th) .

Muhammad Hamim Ma'rifatulloh "Mutiarah Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail" dalam <http://excellent.blogspot.co.id///organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses oktober .

Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *irsyad al-fuhul...*, .



- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, , .
- Muhammad Khudhari Beyk, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, (Cairo: Dar Ihya Al-Kutub, ),
- Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'ilm Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus),
- Muhammad Salam Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Universitas Kuwait, ),
- Musthafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula Ilmu Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul ,Sejarah Ushul Fikih', Jakarta: Pustaka al-Kautsar, ,
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, ), h.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Karya Abadi Jaya, ), .
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, ),
- Siradjuddin 'Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah; Ulama Al-Syafi'i...*, .
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, .
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Isalam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press)
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islam*,
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Zakiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, ),

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ijeh  
Tempat tanggal lahir : Demak, 12 Februari 1983  
Alamat : Ds. Kedungsarimulyo, RT 07 RW 02, Kec.  
Welahan, Kab. Jepara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI

Riwayat pendidikan:

1. SDN Babalan 01 1997
2. MTS Nurul Ittihat Wedung Demak 2000
3. MA Walisongo Pecangaan 2003

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

**NUR IJEH**  
**NIM : 1402026136**